

ABSTRAK

Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala Daerah dan memiliki kedudukan sama tinggi. DPRD mempunyai wewenang di bidang legislatif. Pada perkembangannya, fungsi legislasi DPRD tidak berjalan dengan lancar, di beberapa daerah masih mengalami berbagai permasalahan, termasuk juga di DPRD Kabupaten Pulau Morotai masih dalam posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan fokus penelitian sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, meliputi: a. Kinerja DPRD dalam Mekanisme penyusunan peraturan daerah (Perda), b. Jumlah Perda yang diusulkan, c. Perda inisiatif eksekutif dan legislatif, d. Perda yang diterima dan ditolak, e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam pembuatan peraturan daerah (Perda).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam mekanisme penyusunan peraturan daerah mulai dari tahan perencanaan sampai pada penyebarluasan Perda tersebut sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi penyusunan rancangan peraturan daerah ini yang merancang adalah dari pihak eksekutif dan Raperda-raperda yang diajukan dan dilakukan pembahasan tersebut tidak didasarkan pada Prolegda. Dari jumlah Ranperda yang diusulkan oleh pihak pemerintah daerah mulai dari tahun 2010-2014 sebanyak 32, Perda tersebut adalah Inisiatif Pemerintah Daerah, sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri tidak ada. Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah ke DPRD Kabupaten Pulau Morotai semuanya diterima dan tidak ada yang ditolak oleh DPRD, bahkan Perda tersebut telah menjadi Perda Kabupaten Pulau Morotai saat ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah ini antara lain: Sumber daya manusia, Data atau informasi, dan Pengalaman oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri.

Kata Kunci : Analisis, Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Legislasi.

ABSTRACT

The formation of DPRD is essentially based on the principles of decentralization where the regions have the authority to manage their own households. The provisions regulating regional autonomy are regulated in Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, DPRD is one of the elements of local government administration other than Head of Region and has an equal position. The DPRD has the authority in the legislature. In its development, the legislative function of DPRD did not run smoothly, in some areas still experiencing various problems, including also in Regency DPRD Morotai Island still in a weak position when compared with the regional executive in terms of making local regulations.

The DPRD has the authority in the legislature. In its development, the legislative function of DPRD did not run smoothly, in some areas still experiencing various problems, including also in Regency DPRD Morotai Island still in a weak position when compared with the regional executive in terms of making local regulations. The results of this study indicate that the performance of the Regional People's Legislative Assembly of Pulau Morotai Island in the mechanism of the preparation of local regulations ranging from planning to holding the dissemination of the local regulation has been implemented well, but the drafting of this regional draft is designed from the executive and draft Raperda proposed and made The discussion is not based on Prolegda. From the number of Ranperda proposed by the local government from 2010-2014 as much as 32, Perda is Initiative Local Government, while from the Parliament of Pulau Morotai Island itself is not there. The local regulation submitted by the Regional Government to the District Council of Morotai Island is all accepted and nothing is rejected by the DPRD, even the regulation has become a regulation of Morotai Island regency today.

Factors influencing the performance of DPRD Kabupaten Morotai Island in the implementation of this regulation include: Human Resources, Data or information, and Experiences by Parliament District Morotai Island itself.

Keywords: Analysis, Performance of House of Representatives, Legislation.